

URGENSI PERENCANAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR

DR. MUHAMMAD SAHNAN, M.Pd.

Dosen/Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD)
FKIP Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat
E-mail: msahnun772@gmail.com

ABSTRAK

Perencanaan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan ini melekat pada kegiatan sekolah. Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu kegiatan. Oleh karena itu pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Bagi sebuah lembaga pendidikan, khususnya sekolah dasar, perencanaan menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan pendidikan itu memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga manajemen lembaga pendidikan akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Untuk terselenggaranya pendidikan yang efektif di sekolah dasar, diperlukan perencanaan. Dengan perencanaan akan mengarahkan sekolah tersebut mencapai tujuan apa yang telah ditetapkan. Artinya, perencanaan memberi arah bagi ketercapaian tujuan sebuah sistem, karena pada dasarnya sistem akan berjalan dengan baik jika ada perencanaan yang matang. Perencanaan akan dianggap matang dan baik, jika memenuhi persyaratan dan unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Namun apabila dilihat dalam kenyataan kesehariannya, unsur perencanaan pendidikan masih lebih banyak dijadikan faktor pelengkap atau penjabaran kebijakan pimpinan, sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah para perencana pendidikan masih kurang memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam konteks yang lebih komprehensif. Selain itu, posisi bidang perencanaan belum merupakan *key factor* keberadaan suatu institusi pendidikan. Langkah-langkah perencanaan di sekolah dasar meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai, (2) meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, (3) mengumpulkan data-data atau informasi-informasi yang diperlukan, (4) menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan, (5) merumuskan bagaimana masalah-masalah akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu harus diselesaikan, (5) menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan dari tindakan tersebut, dan (6) menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam penyusunan rencana.

Kata kunci: perencanaan, langkah-langkah, perencana pendidikan, sekolah dasar.

A. PENDAHULUAN

Perencanaan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan ini melekat pada kegiatan sekolah. Sebuah

rencana akan sangat mempengaruhi sukses atau tidaknya suatu kegiatan. Oleh karena itu pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan dan dilaksa-

nakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Bagi sebuah lembaga pendidikan khususnya, sekolah dasar, perencanaan menempati posisi strategis dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan pendidikan itu memberikan kejelasan arah dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan, sehingga manajemen lembaga pendidikan akan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

Untuk terselenggaranya pendidikan yang efektif di sekolah dasar, diperlukan perencanaan. Dengan perencanaan akan mengarahkan sekolah tersebut mencapai tujuan apa yang telah ditetapkan. Artinya, perencanaan memberi arah bagi ketercapaian tujuan sebuah sistem, karena pada dasarnya sistem akan berjalan dengan baik jika ada perencanaan yang matang. Perencanaan akan dianggap matang dan baik, jika memenuhi persyaratan dan unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri.

Namun apabila dilihat dalam kenyataan kesehariannya, unsur perencanaan pendidikan masih lebih banyak dijadikan faktor pelengkap atau penjabaran kebijakan pimpinan, sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal. Salah satu

penyebabnya adalah para perencana pendidikan masih kurang memahami proses dan mekanisme perencanaan dalam konteks yang lebih komprehensif. Selain itu, posisi bidang perencanaan belum merupakan *key factor* keberadaan suatu institusi pendidikan.

Perencanaan mempunyai posisi yang penting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya perencanaan maka jalannya organisasi tidak jelas arah dan tujuannya. Oleh karena itu perencanaan penting karena: (1) Dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan. (2) Dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. (3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik. (4) Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. (5) Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kerja.

Perencanaan mempunyai peranan penting di sekolah dasar. Dengan adanya perencanaan akan dimungkinkan untuk memprediksi kerja di masa yang akan datang, bahkan akan mampu memprediksi kemungkinan hasil yang akan dicapai.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Perencanaan

Menurut Marno dan Triyo Supriyatno (2008:13), perencanaan merupakan salah satu hal penting yang perlu dibuat untuk setiap usaha dalam rangka mencapai suatu tujuan. Demikian pula halnya dalam pendidikan Islam, perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang benar-benar diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola pendidikan Islam. Sebab perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan, kesalahan dalam menentukan perencanaan pendidikan Islam akan berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan pendidikan Islam. Bahkan Allah memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendisain sebuah rencana apa yang akan dilakukan di kemudian hari, sebagaimana firman-Nya dalam Al Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Pengertian perencanaan mempunyai beberapa rumusan yang berbeda satu dengan lainnya. Menurut Cuningham sebagaimana dikutip Made Pidarta (2005:1), perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian. Perencanaan dalam pengertian ini menitikberatkan kepada usaha untuk menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya.

Definisi lain menyatakan bahwa perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang (*what is*) dengan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang berkaitan dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program dan alokasi sumber (Made Pidarta, 2005:3). Perencanaan di sini menekankan pada

usaha mengisi kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan pada masa yang akan datang yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Bintoro Tjokroamidjojo menyatakan bahwa perencanaan dalam arti luas adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Muhammad Fakri, perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lebih lanjut Muhammad Fakri menyatakan bahwa perencanaan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan (Udin Syaifuddin Sa'ud dan Abin Syamsuddin, 2005:4). Dari beberapa pengertian di atas, dapat dianalisis bahwa dalam menyusun perencanaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: berhubungan dengan masa depan; seperangkat kegiatan; proses yang sistematis; hasil dan tujuan tertentu.

Sejalan dengan pengertian perencanaan di atas, maka yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan adalah

suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan untuk kegiatan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dengan cara yang optimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara (Udin Syaifuddin Sa'ud dan Abin Syamsuddin, 2005:27). Menurut Coombs, perencanaan pendidikan adalah suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para peserta didik dan masyarakat.

Sedangkan menurut Beeby C.E. seperti dikutip Asnawir (2005:15), perencanaan pendidikan adalah penerapan ramalan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas, ekonomi dan politik, potensi sistem untuk berkembang, kepentingan negara dan pelayanan masyarakat yang mencakup dalam sistem tersebut.

Dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan aplikasi dari pemikiran yang tersusun untuk mencapai keinginan bersama. Dengan demikian perencanaan yang disusun merupakan konsep yang aplikatif

dan operasional. Dapat juga merupakan aktivitas untuk mengambil keputusan.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ada beberapa unsur penting yang terkandung dalam perencanaan pendidikan, yaitu:

- a. Penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis dalam perencanaan pendidikan, termasuk di dalamnya metodologi dalam perencanaan.
- b. Proses pembangunan dan pengembangan pendidikan, artinya perencanaan pendidikan dilakukan dalam rangka perbaikan pendidikan atau reformasi pendidikan.
- c. Prinsip efektivitas dan efisien, artinya dalam perencanaan pendidikan perlu dipikirkan aspek ekonomis.
- d. Kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat, regional, nasional dan internasional, artinya perencanaan lembaga pendidikan hendaknya mencakup aspek internal dan eksternal dari organisasi sistem lembaga pendidikan. Dengan demikian perencanaan pendidikan bukan sekedar untuk internal lembaga pendidikan dan anak didik, tetapi lebih dari itu juga untuk pertimbangan lingkungan masyarakat sebagai

pengguna sekaligus penerima hasil, termasuk juga kebutuhan regional, nasional dan internasional. Dengan kata lain, menyusun perencanaan hendaknya bersifat universal untuk jangka pendek dan jangka panjang yang kesemuanya bermuara kepada kebutuhan dan tujuan universal.

Dari beberapa definisi tentang perencanaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep yang ada dalam pengertian perencanaan pendidikan adalah:

- a. Suatu rumusan rancangan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi dan tujuan pendidikan.
- b. Memuat langkah atau prosedur dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- c. Merupakan alat kontrol pengendalian perilaku warga satuan pendidikan (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, komite sekolah).
- d. Memuat rumusan hasil yang ingin dicapai dalam proses layanan pendidikan kepada peserta didik.
- e. Menyangkut masa depan proses pengembangan dan pembangunan pendidikan dalam waktu tertentu, yang lebih berkualitas (<http://drarifin.wordpress.com/2010/07/15>).

2. Pentingnya Perencanaan

Perencanaan mempunyai posisi yang penting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya perencanaan maka jalannya organisasi tidak jelas arah dan tujuannya. Oleh sebab itu perencanaan penting karena:

- a. Dengan adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan.
- b. Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.
- c. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik.
- d. Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas.
- e. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kerja.

Dengan demikian perencanaan mempunyai peranan penting dalam organisasi publik maupun dalam organisasi yang bersifat pribadi. Dengan ada-

nya perencanaan akan dimungkinkan untuk memprediksi kerja di masa yang akan datang, bahkan akan mampu memprediksi kemungkinan hasil yang akan dicapai.

Di samping arti penting perencanaan pendidikan sebagaimana disebut di atas, perencanaan pendidikan yang baik juga dapat (H.A.R. Tilaar, 1998: 23):

- a. Meningkatkan kualitas kegiatan atau aktivitas layanan pendidikan anak secara maksimal, baik menyangkut aspek akademik atau non akademiknya. Hal ini disebabkan seluruh aktivitas warga sekolah harus berdasarkan pada program yang telah disusun dengan baik dalam suatu perencanaan pendidikan secara sistematis dan integral.
- b. Mengetahui beberapa sumber daya internal dan eksternal yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara maksimal, dan juga mengetahui beberapa kendala, hambatan dan tantangan yang akan dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan. Hal ini disebabkan, suatu perencanaan pendidikan yang baik pasti akan memuat tentang beberapa peluang dalam mencapai tujuan dan prediksi tantangan

- atau hambatan yang akan muncul, serta strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut.
- c. Memberi peluang pada setiap warga sekolah dalam meningkatkan beragam kemampuan, keahlian atau keterampilan secara maksimal, dalam rangka mewujudkan tujuan layanan pendidikan.
 - d. Memberikan kesempatan bagi pelaksanaannya program untuk memilih beberapa alternatif pilihan tentang metode atau strategi atau pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan perencanaan pendidikan, agar efektif dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.
 - e. Memudahkan dalam pencapaian tujuan pendidikan, karena perencanaan pendidikan yang baik selalu dirancang dengan tahapan-tahapan pelaksanaan program layanan pendidikan (jangka pendek, menengah dan panjang), di samping itu telah disusun skala prioritas sasaran tujuan yang akan dicapai.
 - f. Memudahkan dalam melakukan evaluasi tentang seberapa besar pencapaian tujuan layanan pendidikan yang telah diraih, karena dalam perencanaan pendidikan yang baik

selalu merumuskan indikator-indikator pencapaian tujuan dan instrumen apa yang dipakai dalam mengukur keberhasilan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan.

- g. Memudahkan dalam melakukan revisi program layanan pendidikan dan proses penyusunan perencanaan pendidikan berikutnya, sesuai dengan dinamika dan perkembangan kehidupan sosial-budaya.

3. Langkah Perencanaan Pendidikan

Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada tingkat permulaan dan merupakan aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun langkah-langkah perencanaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut (H.A.R. Tilaar, 1998:16):

- a. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan.
- c. Mengumpulkan data-data atau informasi-informasi yang diperlukan.
- d. Menentukan tahapan-tahapan atau rangkaian tindakan.

-
-
- e. Merumuskan bagaimana masalah-masalah akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu harus diselesaikan.
 - f. Menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang mempengaruhi pelaksanaan dari tindakan tersebut.
 - g. Menentukan cara bagaimana mengadakan perubahan dalam penyusunan rencana.

Sedangkan menurut Banghart dan Trull sebagaimana dikutip Udin Sa'ud Syaifuddin, ada beberapa tahapan yang semestinya dilalui dalam penyusunan perencanaan pendidikan, antara lain:

- a. Tahap *need assessment*, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau pelayanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Kajian awal ini harus cermat, karena fungsi kajian akan memberikan masukan tentang: pencapaian program sebelumnya; sumber daya apa yang tersedia; dan apa yang akan dilakukan dan bagaimana tantangan ke depan yang akan dihadapi.
- b. Tahap *formulation of goals and objective*, yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak

dicapai. Perumusan tujuan perencanaan pendidikan harus berdasarkan pada visi, misi dan hasil kajian awal tentang beragam kebutuhan atau taksiran (*assessment*) layanan pendidikan yang diperlukan.

- c. Tahap *policy and priority setting*, yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam layanan pendidikan. Rumusan prioritas kebijakan ini harus dijabarkan ke dalam strategi dasar layanan pendidikan yang jelas, agar memudahkan dalam pencapaian tujuan.
- d. Tahap *program and project formulation*, yaitu rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan operasional perencanaan pendidikan, menyangkut layanan pendidikan pada aspek akademik dan non akademik.
- e. Tahap *feasibility testing*, yaitu dilakukan uji kelayakan tentang beragam sumber daya (sumber daya internal/eksternal; atau sumber daya manusia/material). Apabila perencanaan disusun berdasarkan sumber daya yang tersedia secara cermat dan akurat, akan menghasilkan tingkat kelayakan rencana pendidikan yang baik.

- f. Tahap *plan implementation*, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Keberhasilan tahap ini sangat ditentukan oleh: kualitas sumber daya manusianya (kepala sekolah, guru, komite sekolah, karyawan, dan siswa); iklim atau pola kerjasama antarunsur dalam satuan pendidikan sebagai suatu tim kerja (*team work*) yang handal; dan kontrol atau pengawasan dan pengendalian kegiatan selama proses pelaksanaan atau implementasi program layanan pendidikan.
- g. Tahap *evaluation and revision for future plan*, yaitu kegiatan untuk menilai (mengevaluasi) tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan, sebagai *feedback* (masukan atau umpan balik), selanjutnya dilakukan revisi program untuk rencana layanan pendidikan berikutnya yang lebih baik.

Selanjutnya dalam menyusun perencanaan harus diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut (H.A.R. Tilaar, 1998:17): perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas; bersifat sederhana, realistis dan praktis; terinci dan

memuat segala uraian serta klasifikasi kegiatan dan rangkaian tindakan, sehingga mudah dipedomani dan dijalankan; memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dan situasi; diusahakan agar tidak terjadi duplikasi dalam pelaksanaan.

4. Bentuk Perencanaan Pendidikan

Menurut Asnawir (dalam H.A.R. Tilaar, 1998:19), ada tujuh jenis perencanaan, yang kesemua itu dilihat dari sudut pandang berbeda. Di antara jenis-jenis perencanaan tersebut adalah:

- a. Dilihat dari segi waktu; perencanaan dapat dibagi menjadi tiga yaitu: perencanaan jangka panjang, biasanya rentang waktunya waktu 10 sampai 30 tahun, bersifat umum dan belum terperinci; perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai jangka waktu antara 5 sampai 10 tahun; perencanaan jangka pendek, mempunyai jangka waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun.
- b. Dilihat dari segi sifatnya perencanaan; dibagi menjadi dua yaitu: perencanaan kuantitatif, yang semua target dan sasaran dinyatakan dengan angka-angka; perencanaan kualitatif adalah perencanaan yang

- ingin dicapai dinyatakan secara kualitas.
- c. Perencanaan dari segi luas wilayah; perencanaan pendidikan dipandang dari segi luas wilayah dapat dibagi menjadi empat, yakni: perencanaan lokal, yaitu perencanaan yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang ada di daerah-daerah dengan sifat yang terbatas; perencanaan regional adalah perencanaan yang ditetapkan di tingkat provinsi; perencanaan nasional, adalah perencanaan di suatu negara dan dijadikan dasar untuk perencanaan lokal dan regional; perencanaan internasional yaitu perencanaan oleh beberapa negara yang melewati batas-batas suatu negara yang dilaksanakan melalui wakil-wakil dari negara-negara tersebut.
- d. Perencanaan dari segi luas jangkauan; terbagi menjadi dua yaitu: perencanaan makro yaitu perencanaan yang bersifat universal, menyeluruh dan meluas; perencanaan mikro adalah perencanaan yang ditetapkan dan disusun berdasarkan kondisi dan situasi tertentu.
- e. Dari segi prioritas pembuatnya; perencanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: perencanaan sentralisasi, yaitu perencanaan yang ditentukan oleh pemerintah pusat pada suatu negara; perencanaan desentralisasi yaitu perencanaan yang disusun oleh masing-masing wilayah; perencanaan dekonsentrasi yaitu perencanaan gabungan antara sentralisasi dengan desentralisasi.
- f. Dari segi obyek perencanaan; dibagi menjadi dua, yaitu: perencanaan rutin yaitu perencanaan yang disusun untuk jangka waktu tertentu yang dilakukan setiap tahun; perencanaan eksendental, yaitu perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada saat tertentu.
- g. Dari segi proses; perencanaan dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yakni: perencanaan filosofikal, yaitu perencanaan yang bersifat umum, hanya berupa konsep-konsep dari nilai yang bersifat ideal dan masih memerlukan penafsiran-penafsiran dalam bentuk program; perencanaan programial adalah perencanaan berupa penjabaran dari perencanaan filosofikal; perencanaan operasional yaitu perencanaan yang jelas dan dapat dilakukan.

5. Pendekatan Perencanaan

Pendidikan

Menurut para ahli, ada beragam pendekatan perencanaan pendidikan, yaitu: pendekatan kebutuhan sosial (*social demand approach*); pendekatan ketenagakerjaan (*manpower approach*); pendekatan untung rugi (*cost and benefit approach*); dan pendekatan keefektifan biaya (*cost effectiveness approach*). Berikut ini akan dijelaskan secara singkat keempat pendekatan perencanaan pendidikan tersebut:

a. Pendekatan kebutuhan sosial

Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan kebutuhan sosial, oleh para ahli disebut pendekatan yang bersifat tradisional, karena fokus atau tujuan yang hendak dicapai dalam pendekatan kebutuhan sosial ini lebih menekankan pada: tercapainya pemenuhan kebutuhan atau tuntutan seluruh individu terhadap layanan pendidikan dasar; pemberian layanan pembelajaran untuk membebaskan populasi usia sekolah dari tuna aksara (buta huruf); dan pemberian layanan pendidikan untuk membebaskan rakyat dari rasa ketakutan dari penjajahan, dari kebodohan dan dari kemiskinan.

Oleh karena itu pendekatan kebutuhan sosial ini biasanya dilaksanakan pada negara-negara yang baru meraih kemerdekaan dari penjajahan, dengan kondisi masyarakat pribumi yang terbelakang pendidikannya dan kondisi sosial ekonominya.

Apabila pendekatan kebutuhan sosial ini dipakai, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan oleh penyusun perencanaan dalam merancang perencanaan pendidikan, antara lain: melakukan analisis tentang pertumbuhan penduduknya; melakukan analisis tentang tingkat partisipasi warga masyarakatnya dalam pelaksanaan pendidikan, misalnya melakukan analisis persentase penduduk yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan, yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan; melakukan analisis tentang dinamika atau gerak (mobilitas) peserta didik dari sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi, misalnya kenaikan kelas, kelulusan, dan *dropout*; melakukan analisis tentang minat atau keinginan warga masyarakat tentang jenis layanan pendidikan di sekolah; melakukan analisis tentang tenaga pendidik dan kependidi-

kan yang dibutuhkan, dan dapat difungsikan secara maksimal dalam proses layanan pendidikan; dan melakukan analisis tentang keterkaitan antara *output* satuan pendidikan dengan tuntutan masyarakat atau kebutuhan sosial di masyarakat.

Ada beberapa kelebihan dan kekurangan penggunaan pendekatan kebutuhan sosial dalam perencanaan pendidikan. Di antara sisi positif pendekatan ini antara lain:

- a. Pendekatan ini lebih cocok untuk diterapkan pada masyarakat atau negara yang baru merdeka dengan kondisi kebutuhan sosial, khususnya layanan pendidikan masih sangat rendah atau masih banyak yang buta huruf.
- b. Pendekatan ini akan lebih cepat dalam memberikan pemerataan layanan pendidikan dasar yang dibutuhkan pada warga masyarakat, karena keterbelakangan di bidang pendidikan akibat penjajahan, sehingga layanan pendidikan yang diberikan langsung bersentuhan dengan kebutuhan sosial yang mendasar yang dirasakan oleh masyarakat.

Sedangkan sisi kelemahan pendekatan kebutuhan sosial ini antara lain:

- a. Pendekatan ini cenderung hanya untuk menjawab persoalan yang dibutuhkan masyarakat pada saat itu, yaitu pemenuhan kebutuhan atau tuntutan layanan pendidikan dasar sebesar-besarnya, sehingga mengabaikan pertimbangan efisiensi pembiayaan pendidikan.
- b. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek kuantitas (jumlah yang terlayani sebanyak-banyaknya), sehingga kurang memperhatikan kualitas dan efektivitas pendidikan, oleh karena itu pendekatan ini terkesan lebih boros.
- c. Pendekatan ini mengabaikan ciri-ciri dan pola kebutuhan *man power* yang diperlukan di sektor kehidupan ekonomi, dengan demikian hasil atau *output* pendidikan cenderung kurang bisa memenuhi tuntutan kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
- d. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek pemerataan pendidikan (dimensi kuantitatif) dan kurang mementingkan aspek kualitatif.

Di samping itu pendekatan ini kurang memberikan jawaban yang kom-

prehensif dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, karena lebih menekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan sosial, sementara aspek atau bidang kehidupan yang lain kurang diperhatikan.

b. Pendekatan ketenagakerjaan

Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan antara *output* (lulusan) layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan dengan tuntutan atau keterserapan akan kebutuhan tenaga kerja di masyarakat. Apabila pendekatan ini dipakai oleh para penyusun perencanaan pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Melakukan kajian atau analisis tentang beragam kebutuhan yang diperlukan oleh dunia kerja yang ada di masyarakat secermat mungkin.
- b. Melakukan kajian atau analisis tentang beragam bekal pengetahuan dan keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh peserta didik agar mereka mampu menyesuaikan diri secara cepat (*adaptif*) terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di dunia kerja.
- c. Mengkaji atau menganalisis tentang sistem layanan pendidikan yang

terbaik dan mampu memberikan bekal yang cukup bagi siswa untuk terjun di dunia kerja, oleh karena itu perlu dilakukan analisis peluang kerja dan menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri (*link and match*).

Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan ketenagakerjaan, yaitu:

Pertama, beberapa kebaikan dari pendekatan perencanaan pendidikan ketenagakerjaan, antara lain: proses pembelajaran atau layanan pendidikan di satuan pendidikan mempunyai aspek korelasional yang tinggi dengan tuntutan dunia kerja yang dibutuhkan masyarakat; dan pendekatan ini mengharuskan adanya keterjalinan yang erat antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri, hal ini tentu sangat positif untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia industri-usaha.

Kedua, beberapa kelemahan dari pendekatan perencanaan pendidikan ketenagakerjaan, antara lain: mempunyai peranan yang terbatas terhadap perencanaan pendidikan, karena pendekatan ini telah mengabaikan peran sekolah

menengah umum, dan lebih mengutamakan sekolah menengah kejuruan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. Dalam realitasnya masih banyak lulusan sekolah menengah kejuruan yang menganggur (*output*-nya tidak terserap di dunia kerja); perencanaan ini lebih menggunakan orientasi, klasifikasi dan rasio antara permintaan dan persediaan; dan tujuan utamanya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, sedangkan di sisi lain tuntutan dunia kerja selalu berubah-ubah (bersifat dinamik) begitu cepat, sehingga lembaga pendidikan kejuruan sering kurang mampu mengantisipasinya dengan baik.

c. Pendekatan keefektifan biaya

Pendekatan ini berorientasi pada konsep *investment in human capital* (investasi pada sumber daya manusia). Pendekatan ini sering disebut pendekatan untung rugi. Di antara ciri-ciri pendekatan ini antara lain:

- a. Pendidikan memerlukan biaya investasi yang besar, oleh karena itu perencanaan pendidikan yang disusun harus mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomis.
- b. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi, bahwa: kualitas layanan pendidikan akan menghasilkan

output yang baik dan secara langsung akan memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat; sumbangan seseorang terhadap pendapatan nasional adalah sebanding dengan tingkat pendidikannya; perbedaan pendapatan seseorang di masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan, bukan ditentukan oleh latar belakang sosialnya.

- c. Perencanaan pendidikan harus betul-betul diorientasikan pada upaya meningkatkan kualitas SDM (penguasaan Iptek), dan dengan tersedianya kualitas SDM, maka diharapkan *income* masyarakat akan meningkat.
- d. Program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi akan menempati prioritas pembiayaan yang besar.

Ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari perencanaan pendidikan dengan pendekatan keefektifan biaya, yaitu:

Pertama, kelebihan pendekatan keefektifan biaya, antara lain: perencanaan pendidikan yang disusun akan mempunyai aspek fungsional dan keuntungan ekonomis, sehingga bentuk-bentuk layanan pendidikan yang dianggap

kurang produktif bisa ditiadakan melalui pendekatan efisiensi investasi; dan pendekatan ini selalu memilih alternatif yang menghasilkan keuntungan lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan.

Kedua, kelemahan pendekatan keefektifan biaya, antara lain: akan mengalami kesulitan dalam menentukan secara pasti biaya dan keuntungan (*cost and benefit*) dari layanan pendidikan, terlebih apabila digunakan mengukur keuntungan untuk periode atau masa yang akan datang; sangat sulit untuk mengukur secara pasti atau menghitung keuntungan (*benefit*) yang dihasilkan oleh seseorang dalam lapangan pekerjaan yang dikaitkan dengan layanan pendidikan sebelumnya; pendekatan ini mengabaikan hubungan antara penghasilan seseorang dengan faktor internal individu (misalnya motivasi, disiplin nurani, kelas sosial, orientasi hidup individu, dan sejenisnya), dan hanya melihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan; perbedaan pendapatan seseorang sebenarnya tidak semata-mata menunjukkan kemampuan produktivitas individual, tetapi ada faktor lain yang ikut menentukan yaitu faktor konvensi sosial atau banyak

dipengaruhi dari kerja kelompok; dan keuntungan dari pendidikan pada dasarnya tidak hanya diukur berupa keuntungan finansial (material), tetapi juga dapat dilihat dari keuntungan sosial-budaya (S. Makmun Abin, dkk., 2001; S. Sa'ud dan S. Makmun A., 2007).

d. Pendekatan integratif

Perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan integrasi (terpadu) dianggap sebagai pendekatan yang lebih lengkap dan relatif lebih baik daripada ketiga pendekatan di atas. Pendekatan ini sering disebut dengan "pendekatan sistemik atau pendekatan sinergik". Di antara ciri atau karakteristik pendekatan integratif adalah bahwa perencanaan pendidikan yang disusun berdasarkan pada:

- a. Keterpaduan orientasi dan kepentingan terhadap pengembangan individu dan pengembangan sosial (kelompok).
- b. Keterpaduan antara pemenuhan kebutuhan ketenagakerjaan (bersifat pragmatis) dan juga mempersiapkan pengembangan kualitas akademik (bersifat idealis) untuk mempersiapkan studi lanjut.
- c. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomis (untung rugi), dan pertim-

- bangan layanan sosial-budaya dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya integrasi sosial-budaya.
- d. Keterpaduan pemberdayaan terhadap sumber daya lembaga, baik sumber daya internal maupun sumber daya eksternal.
 - e. Konsep bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam proses layanan pendidikan (pelaksanaan program) di setiap satuan pendidikan merupakan “suatu sistem”.
 - f. Konsep bahwa kontrol dan evaluasi pelaksanaan program (perencanaan pendidikan) melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan proses layanan kualitas pendidikan, dengan tetap berada dalam komando pimpinan atau kepala satuan pendidikan. Sedangkan pihak-pihak yang dapat terlibat dalam proses evaluasi pelaksanaan perencanaan pendidikan di setiap satuan pendidikan adalah: kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan.

Sedangkan kelebihan dan kelemahan pendekatan perencanaan pendidikan integrasi atau terpadu adalah:

Pertama, kelebihan pendekatan terpadu antara lain: semua sumber daya (internal-eksternal) yang dimiliki dalam proses pengembangan pendidikan akan terberdayakan secara baik dan seimbang; dalam proses pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan memberikan peluang secara maksimal kepada setiap warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa dan komite sekolah (tokoh dan orangtua wali siswa) untuk berkontribusi secara positif sesuai dengan status dan peran masing-masing; peluang untuk pencapaian tujuan pendidikan yang telah dirumuskan akan lebih efektif, karena dalam perencanaan terpadu memberikan porsi yang cukup besar bagi pemberdayaan semua potensi yang dimiliki secara kelembagaan, dan menuntut partisipasi aktif dari semua warga sekolah; perencanaan pendidikan yang terpadu akan mampu menghadapi perubahan atau dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya atau tingkat kompetisi yang begitu tinggi di semua bidang kehidupan di era globalisasi; pelaksanaan pendekatan perencanaan pendidikan terpadu secara baik akan mampu mensosialisasi dan menginternalisasi setiap warga sekolah, untuk membangun sikap mental

dan pola perilaku yang integral atau multidimensional atau komprehensif dalam memahami dan melaksanakan setiap agenda kehidupan di masyarakat; dan *output* dari proses layanan pendidikan pada peserta didik akan lebih menampilkan potret hasil pendidikan yang lengkap, baik kualitas akademiknya, kualitas kepribadiannya dan kualitas keterampilannya.

Kedua, kelemahan pendekatan terpadu antara lain: (1) Pendekatan ini memerlukan ketersediaan kualitas sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), khususnya kualitas pengetahuan, mentalitas atau kepribadiannya, dan spiritualnya. Dalam realitasnya menurut data Depdiknas 2006-2007, khususnya tentang kualitas tenaga pendidik (guru) secara makro (nasional) dari jenjang pendidikan paling dasar sampai menengah atas yang betul-betul telah memenuhi standar kualitas guru yang profesional masih kurang dari 20%, atau kurang lebih 80% guru-guru di Indonesia belum memiliki kualifikasi sebagai guru yang profesional (<http://drarifin.wordpress.com>). Hal ini tentu sangat menyulitkan proses pelaksanaan perencanaan pendidikan yang integratif. (2) Perencanaan pendidikan terpadu

menuntut kualitas pengelolaan manajemen kelembagaan secara transparan, akuntabel, demokratik dan visioner. Dalam realitasnya masih banyak dijumpai pola pengelolaan manajemen di setiap satuan pendidikan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). (3) Perencanaan pendidikan terpadu menuntut kualitas peran serta masyarakat (PSM) dalam meningkatkan layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan, khususnya dalam melaksanakan empat peran penting, yaitu sebagai: (a) pemberi pertimbangan (*advisory*); (b) pendukung (*supporting*); (c) pengontrol (*controlling*); dan (d) mediator. Dalam realitasnya keempat peran tersebut belum terlaksana dengan baik di setiap lembaga atau satuan pendidikan.

Jadi, uraian tentang kelemahan pendekatan integratif atau terpadu atau sistemik sejatinya tidak menyangkut ranah konseptual, tetapi lebih bersentuhan pada tataran unsur pendukung dalam pelaksanaan program (aplikasinya). Oleh karena itu secara konseptual pendekatan perencanaan integrasi merupakan pendekatan yang paling baik apabila dibandingkan dengan pendekatan

yang lain yang lebih bersifat parsial (sektoral). Hal yang paling kunci untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan pada perencanaan pendidikan integratif adalah: (a) terus mendorong pengembangan kualitas SDM warga sekolah, (b) terus meningkatkan kualitas manajemen satuan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip MPMBS, dan (c) terus meningkatkan kualitas peran serta masyarakat (PSM) untuk mencapai tujuan pendidikan.

C. PENUTUP

Perencanaan memiliki peranan yang amat penting dalam pengelolaan sebuah institusi atau lembaga, terutama pada lembaga pendidikan, karena lembaga pendidikan bukanlah menghasilkan barang dan jasa. Lembaga pendidikan merupakan sebuah pabrik yang akan memproduksi generasi-generasi yang unggul dalam prestasi dan anggun dalam akhlak, apalagi dengan lembaga yang berlabelkan Islam sebagai pandangan dan pedoman dalam membina dan mengembangkan peserta didik.

Perencanaan meliputi perencanaan strategik yang diukur dari berbagai

sudut pandang, baik itu lembaga, lingkungan eksternal, peluang dan sebagainya yang bertujuan mampu mengelola organisasi atau lembaga pendidikan Islam sesuai target dan mencapai sasaran. Sedangkan perencanaan operasional merupakan langkah-langkah nyata dalam pengoperasionalan sebuah lembaga pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawir. 2005. *Administrasi Pendidikan*. Padang: IAIN IB Press.
<http://drarifin.wordpress.com/2010/07/15/konsep-perencanaan-pendekatan-dan-model-perencanaan-pendidikan>.
- Pidarta, Made. 2010. *Perencanaan Pendidikan Parsipatori*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyatno, Triyo dan Marno. 2008. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Bandung: Refika Aditama.
- Syaifuddin, Sa'ud Udin dan Syamsuddin Abin. 2005. *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. 1998. *Manajemen Pendidikan Nasional (Kajian Pendidikan Masa Depan)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

hz